

## Karakteristik Pemerintah Daerah dan Financial Distress: Pendekatan Moderasi Opini Audit sebagai Deteksi Dini Fiskal

Annisa Fitriana Kusumawati\*, Nursiam Nursiam, Putri Linggasari Sofi, Rafi Amani Muflih Rahardi, Kenji Satriatama, Pinnacle Ferdyan, Ahmad Syihan Setiawan

Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Muhammadiyah Surakarta, Solo, Indonesia

Email: <sup>1,\*</sup>afk162@ums.ac.id, <sup>2</sup>nur183@ums.ac.id, <sup>3</sup>pls719@ums.ac.id, <sup>4</sup>ram872@ums.ac.id, <sup>5</sup>b200230366@student.ums.ac.id,

<sup>6</sup>b200220489@student.ums.ac.id, <sup>7</sup>b200220486@ums.ac.id

Email Penulis Korespondensi: afk162@ums.ac.id

Submitted: 02/06/2025; Accepted: 30/06/2025; Published: 30/06/2025

**Abstrak**—Urgensi dari penelitian ini berawal dari pandemi covid-19 yang menimbulkan tantangan kesehatan dan ekonomi di banyak negara. Krisis ini menyebabkan pemerintah daerah berada dalam kondisi *distress*, yang mana sinyal awal terjadinya *financial distress* pada pemerintah daerah memiliki peran penting karena beberapa alasan. Opini audit yang diterbitkan oleh auditor eksternal seperti BPK dapat memberikan gambaran yang jelas mengenai kondisi keuangan dan transparansi pengelolaan anggaran di tingkat pemerintah daerah. Opini audit ini dinilai dapat memberikan indikasi awal terkait masalah keuangan yang mungkin dihadapi oleh pemerintah daerah. Oleh karena itu, tujuan dari penelitian ini (1) Untuk menganalisis hubungan karakteristik pemerintah daerah terhadap *financial distress* (2) Untuk mencari bukti empiris mengenai dampak apakah opini audit dapat menjadi sinyal awal terhadap terjadinya *financial distress*. Metode penelitian yang digunakan adalah kuantitatif menggunakan regresi linier berganda untuk menguji pengaruh karakteristik pemerintah daerah terhadap *financial distress*, selain itu menggunakan analisis interaksi moderasi untuk mengetahui peran opini audit sebagai variabel moderator. Data yang digunakan adalah laporan keuangan perusahaan pada sektor infrastruktur, utilitas, dan transportasi pada tahun 2020-2023 dengan pengolahan data menggunakan SPSS versi 26. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ketergantungan finansial dan solvabilitas layanan tidak berpengaruh signifikan terhadap *financial distress* dengan nilai signifikansi masing-masing sebesar  $0,153 > 0,05$  serta  $0,964 > 0,05$ , sedangkan kemandirian daerah, kemiskinan, dan pendapatan asli daerah berpengaruh signifikan dengan nilai signifikansi masing-masing  $0,015 < 0,05$  dan  $0,019 < 0,05$ ; dan  $0,001 < 0,05$ . Kemandirian daerah dan PAD yang tinggi cenderung menurunkan risiko *financial distress*, sementara tingkat kemiskinan yang tinggi meningkatkan risikonya. Opini audit ditemukan memoderasi hubungan antara kemandirian daerah dan *financial distress* dengan nilai signifikansi  $0,017 < 0,05$ , namun tidak memoderasi hubungan antara solvabilitas layanan, kemiskinan, pad, maupun ketergantungan finansial dengan *financial distress* yang ditunjukkan melalui signifikansi masing-masing variabel tersebut sebesar  $0,627 > 0,05$ ;  $0,545 > 0,05$ ;  $0,969 > 0,05$ ; serta  $0,638 > 0,05$ . Temuan ini menekankan pentingnya peningkatan kemandirian fiskal dan pengelolaan PAD serta pengentasan kemiskinan sebagai strategi untuk menjaga stabilitas keuangan daerah.

**Kata Kunci:** Karakteristik Pemerintah Daerah; Financial Distress; Opini Audit; Pemerintah Daerah; Indonesia

**Abstract**—The urgency of this research stems from the Covid-19 pandemic which has caused health and economic challenges in many countries. This crisis has caused local governments to be in distress, where the initial signs of financial distress in local governments are very important for several reasons. Audit opinions issued by external auditors such as the BPK can provide a clear picture of the financial condition and transparency of budget management at the local government level. Therefore, the objectives of this study are (1) To analyze the relationship between local government characteristics and financial distress (2) To find empirical evidence regarding the impact of whether audit opinions can be an early signal of financial distress. The research method used is quantitative using multiple linear regression to test the effect of local government characteristics on financial distress, in addition to using moderation interaction analysis to determine the role of audit opinion as a moderator variable. The data used are financial reports of companies in the infrastructure, utilities, and transportation sectors in 2020-2023 with data processing using SPSS version 26. The results of the study indicate that financial dependence and service solvency do not have a significant effect on financial distress, while regional independence, poverty, and local revenue have a significant effect. High regional independence and PAD tend to reduce the risk of financial distress, while high poverty rates increase the risk. Audit opinions were found to moderate the relationship between regional independence and financial distress, but did not moderate the relationship between service solvency or other variables with financial distress. These findings emphasize the importance of increasing fiscal independence and PAD management as well as poverty alleviation as a strategy to maintain regional financial stability.

**Keywords:** Characteristics of Local Government; Financial Distress; Audit Opinion; Local Government; Indonesia

## 1. PENDAHULUAN

Pemerintah daerah memiliki peran sentral dalam menjalankan fungsi pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan publik secara langsung kepada masyarakat. Dalam era desentralisasi fiskal, semakin besar kewenangan yang dimiliki pemerintah daerah untuk mengelola anggaran dan mengambil keputusan strategis sesuai karakteristik serta kebutuhan lokal. Namun, kewenangan tersebut juga membawa konsekuensi seperti pemerintah daerah dituntut untuk lebih transparan, efisien, dan akuntabel dalam mengelola keuangannya. Namun, dalam beberapa kasus, pengelolaan keuangan yang buruk dapat menyebabkan *financial distress* atau kesulitan keuangan, yang dapat mengganggu kelancaran pelayanan publik, menurunkan daya saing daerah tersebut, merusak kredibilitas pemerintah, juga mempengaruhi keputusan penting dan vital yang dibuat oleh pemerintah terkait (Tarighi et al., 2022). Oleh karena itu, sangat penting bagi pemerintah daerah untuk mengidentifikasi masalah keuangan sejak dini (Zhao et al., 2022), sehingga langkah-langkah pencegahan atau perbaikan dapat diambil sebelum masalah semakin besar.

Fenomena *financial distress* di pemerintah daerah bukanlah isu yang muncul secara tiba-tiba. Ia merupakan hasil dari akumulasi kelemahan dalam perencanaan, pengelolaan, dan pengawasan keuangan daerah. Salah satu pendekatan

yang digunakan untuk mendeteksi kemungkinan adanya potensi masalah fiskal adalah melalui opini audit yang dikeluarkan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) melalui dua kriteria yakni melalui hasil pemeriksaan laporan keuangan dengan menilai efektivitas sistem pengendalian internal serta kepatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan (Indra et al., 2022). Opini audit merupakan bentuk evaluasi profesional atas kelayakan penyajian laporan keuangan pemerintah daerah, serta mencerminkan tingkat kepatuhan terhadap standar akuntansi pemerintahan. Opini yang diberikan bervariasi, mulai dari Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), Wajar Dengan Pengecualian (WDP), Tidak Wajar, hingga Tidak Memberikan Pendapat (*Disclaimer*) (Ibrahim, 2024). Opini yang tidak baik sering kali dihubungkan dengan lemahnya pengendalian internal, ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, serta adanya risiko penyimpangan dan inefisiensi dalam pengelolaan keuangan.

Namun demikian, opini audit tidak dapat berdiri sendiri dalam menjelaskan risiko *financial distress*. Sebuah daerah yang menerima opini WDP atau bahkan *disclaimer* belum tentu akan mengalami distress apabila memiliki kapasitas fiskal yang kuat dan ketahanan kelembagaan yang memadai. Sebaliknya, daerah yang memperoleh opini WTP belum tentu terbebas dari tekanan fiskal jika struktur keuangannya bergantung secara berlebihan pada transfer pusat atau memiliki beban belanja yang tinggi. Oleh karena itu, penting untuk melihat *opini audit* dalam konteks karakteristik struktural pemerintah daerah itu sendiri. Secara lebih jauh, opini audit pun bukanlah satu-satunya faktor yang memengaruhi terjadinya *financial distress*. Karakteristik pemerintah daerah, seperti ketergantungan finansial, kemandirian daerah, solvabilitas layanan, dan kemiskinan dinilai memiliki pengaruh yang signifikan terhadap *financial distress* (Padovani et al., 2024; Rahmi & Sari, 2023). Daerah dengan ketergantungan yang tinggi terhadap dana transfer pusat atau dengan manajemen keuangan yang lemah cenderung lebih rentan menghadapi kesulitan keuangan (Rahmi & Sari, 2023). Di sisi lain, daerah dengan PAD yang rendah atau pertumbuhan ekonomi yang terbatas juga menghadapi tantangan besar dalam mengelola anggaran dan utang yang mana diperkuat dengan kebocoran anggaran menggerus kapasitas fiskal riil pemerintah daerah. Saat dana bocor, program publik tidak berjalan optimal, beban belanja tetap ada, dan potensi pendapatan hilang yang berpotensi mengarah pada *financial distress* (Paranata, 2022).

Berbagai studi menunjukkan bahwa penyebab utama dari kondisi distress fiskal tidak hanya berasal dari sisi belanja modal yang tidak terkendali, tetapi juga dari karakteristik fiskal dan sosial daerah itu sendiri (Kusumawati, 2024). Daerah dengan ketergantungan tinggi terhadap dana transfer dari pusat cenderung lebih rapuh secara fiskal karena rendahnya kapasitas pendapatan mandiri (Wang et al., 2021). Sebaliknya, tingkat kemandirian daerah dan tingginya pendapatan asli daerah dapat mencerminkan ketahanan fiskal yang lebih baik, karena menunjukkan kemampuan daerah dalam membiayai kebutuhan sendiri (Haptari et al., 2022). Selain itu, solvabilitas layanan, atau kemampuan daerah dalam membiayai layanan publik utama seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur, menjadi indikator penting atas kelangsungan fiskal jangka Panjang (Alshaib et al., 2023; Wojtowicz & Hodzic, 2023). Di sisi lain, tingkat kemiskinan yang tinggi dapat memperlemah basis pajak dan menambah beban belanja sosial, sehingga meningkatkan tekanan terhadap keuangan daerah (Soto et al., 2024).

Meskipun indikator-indikator struktural tersebut memberikan gambaran penting mengenai kerentanan fiskal, mereka belum cukup untuk memberikan sinyal yang eksplisit tentang kondisi *financial distress*. Di sinilah opini audit dari lembaga pemeriksa eksternal, seperti Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), memainkan peranan penting. Opini audit mencerminkan kualitas penyajian laporan keuangan, kepatuhan terhadap regulasi, serta efektivitas pengendalian internal. Opini buruk seperti *disclaimer* atau *adverse* sering kali menjadi alarm atas adanya potensi kegagalan fiskal. Namun, tidak semua opini buruk berujung pada distress, dan tidak semua opini baik menjamin stabilitas keuangan. Fakta tersebut menunjukkan bahwa opini audit berpotensi berfungsi sebagai variabel moderasi, yang dapat memperkuat atau memperlemah pengaruh karakteristik daerah terhadap potensi *financial distress*. Dengan kata lain, bagaimana opini audit membaca dan mencerminkan risiko fiskal dari struktur daerah menjadi aspek penting dalam mendeteksi kondisi krisis lebih awal (Diab & Eissa, 2023).

Meskipun isu *financial distress* pada pemerintah daerah telah banyak diteliti, sebagian besar studi sebelumnya cenderung fokus pada aspek pengeluaran yang tidak efisien, defisit anggaran, atau rasio utang sebagai indikator utama (Brändle & Elsener, 2024; Hanson et al., 2022; Mai et al., 2024; Xu et al., 2020). Padahal, *financial distress* bersifat multifaktor dan seringkali dipicu oleh struktur fiskal daerah itu sendiri, seperti ketergantungan pada dana transfer atau rendahnya kapasitas pendapatan asli daerah (PAD). Penelitian yang mengintegrasikan variabel-variabel karakteristik fiskal dan sosial daerah seperti ketergantungan finansial, kemandirian fiskal, solvabilitas layanan, kemiskinan, dan pendapatan asli daerah sebagai determinan *financial distress* masih relatif terbatas, khususnya dalam konteks pemerintah daerah di Indonesia.

Di sisi lain, opini audit sebagai hasil pemeriksaan eksternal seharusnya berperan sebagai *early warning system* terhadap potensi distress fiskal. Namun, banyak penelitian sebelumnya hanya menempatkan opini audit sebagai variabel independen yang berdiri sendiri (Diab & Eissa, 2023; Paranata, 2022; Ibrahim, 2024; Indra et al., 2022), bukan sebagai variabel yang memperkuat atau memperlemah hubungan antara kondisi struktural fiskal dan potensi distress. Padahal dalam praktiknya, opini audit bisa menjadi alat interpretatif terhadap kondisi yang mendasari laporan keuangan misalnya seperti apakah kemiskinan tinggi dan PAD rendah itu juga tercermin dalam opini audit yang diberikan. Oleh karena itu, penelitian ini menawarkan novelty sebagai berikut: (1) Menyertakan *financial distress* sebagai variabel penting yang dipengaruhi oleh opini audit, yang belum banyak dibahas secara komprehensif; (2) Fokus spesifik pada karakteristik auditor (seperti ketergantungan finansial, kemandirian daerah, solvabilitas layanan, dan kemiskinan) dan kaitannya dengan *financial distress*, sebuah dimensi yang belum sepenuhnya tereksplorasi dalam literatur yang ada; serta (3)

Penggabungan kondisi keuangan pemerintah daerah se-Jawa sebagai faktor tambahan dalam menganalisis *financial distress*, yang dapat memperkaya kajian literatur terkait pengelolaan keuangan dan audit dalam konteks yang lebih luas.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis apakah opini audit dapat berfungsi sebagai sinyal awal terjadinya *financial distress* pada pemerintah daerah, dengan mempertimbangkan karakteristik khusus dari daerah tersebut. Penelitian ini akan menguji pengaruh opini audit terhadap kemungkinan terjadinya *financial distress* pada pemerintah daerah, serta bagaimana karakteristik daerah seperti ketergantungan pada transfer dana pemerintah pusat, kemandirian daerah, solvabilitas layanan, pendapatan asli daerah, dan kemiskinan dapat mempengaruhi hubungan antara opini audit dan potensi kesulitan keuangan.

Terakhir, studi ini memberikan tiga kontribusi utama yakni (1) Penelitian ini memperkaya literatur mengenai *financial distress* di sektor publik dengan pendekatan yang lebih komprehensif. Tidak hanya mengkaji indikator keuangan semata, tetapi juga mempertimbangkan karakteristik fiskal dan sosial daerah sebagai determinan utama distress. Selain itu, dengan memposisikan opini audit sebagai variabel moderasi, penelitian ini memberikan kontribusi baru terhadap studi audit sektor publik, khususnya dalam memahami peran opini audit sebagai sinyal atas kondisi fiskal daerah bukan hanya sebagai penilaian teknis laporan keuangan; (2) Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai alat deteksi dini (*early warning system*) bagi pemerintah daerah untuk mengidentifikasi potensi distress secara lebih akurat. Pemerintah daerah dapat lebih fokus memperbaiki aspek struktural fiskal yang terbukti signifikan memicu distress, seperti ketergantungan pada dana pusat atau rendahnya solvabilitas layanan. Selain itu, hasil studi ini juga dapat digunakan oleh auditor untuk mempertajam interpretasi opini terhadap kondisi riil keuangan daerah, bukan hanya berdasarkan kesesuaian teknis; dan (3) Secara kebijakan, temuan dari penelitian ini dapat menjadi bahan pertimbangan bagi Kementerian Dalam Negeri, BPK, dan lembaga pengawasan keuangan lainnya dalam merumuskan strategi pembinaan fiskal dan tata kelola daerah. Dengan memahami hubungan antara karakteristik daerah, opini audit, dan distress fiskal, maka intervensi pemerintah pusat dapat lebih tepat sasaran, terutama pada daerah-daerah dengan kombinasi risiko yang tinggi.

## 2. METODE PENELITIAN

Sebelum membahas terkait dengan metode penelitian, kajian literatur dalam penelitian ini disajikan sebagai berikut:

### a. *Stewardship Theory*

Teori *Stewardship* menggambarkan sebuah situasi dimana pengelolaan didalam pemerintah lebih mengutamakan tujuan kepentingan organisasi dan tidak termotivasi oleh tujuan individu (Sakina et al., 2024). Hal ini dikarenakan individu memiliki motivasi untuk melakukan layanan publik atau yang seringkali disebut dengan orientasi individu untuk memberikan layanan kepada masyarakat dengan tujuan berbuat baik untuk orang lain dan Masyarakat (Cuellar, 2024) Teori ini menekankan pada motivasi pro-sosial altruistik untuk melayani kepentingan publik karena kewajiban dan kesetiaan untuk membantu dan memenuhi kebutuhan masyarakat tertentu dengan memberikan layanan dan kasih sayang untuk menciptakan dan memelihara sektor publik yang lebih efisien dan efektif. Pemerintah akan bersama-sama mendorong para pekerja sosial untuk dapat bekerja keras membantu masyarakat guna mencapai tujuan pemerintah yaitu meningkatkan kesejahteraan rakyat. Oleh karena itu, dengan adanya sinkronisasi yang baik akan memaksimalkan utilitas kelompok yang pada akhirnya akan memaksimalkan kepentingan individu yang ada dalam kelompok organisasi tersebut.

### b. *Financial Distress*

*Financial Distress* adalah suatu kondisi dimana keuangan pemerintahan dalam kondisi tidak sehat dan sedang mengalami krisis yang ditandai dengan ketidakmampuan untuk menyeimbangkan anggaran dan menyediakan layanan serta memenuhi kewajiban dimasa mendatang (Padovani et al., 2024). Ketika finansial pemerintah memburuk ke titik dimana ia tidak dapat memenuhi kewajiban keuangan maka dapat dikatakan bahwa pemerintah tersebut dikatakan telah memasuki keadaan kesulitan keuangan. Tanda-tanda kesulitan keuangan yang pertama biasanya berupa pelanggaran perjanjian utang yang dimiliki (Tarighi et al., 2022). Dengan kata lain, proses terjadinya *financial distress* dimulai dengan adanya serangkaian kondisi ekonomi yang buruk diiringi dengan manajemen keuangan yang merugikan.

### c. Ketergantungan Finansial

Ketergantungan keuangan daerah menunjukkan besarnya ketergantungan pemerintah daerah terhadap pemerintah pusat (Rahmi & Sari, 2023). Rasio ini dapat dihitung dengan cara membandingkan jumlah pendapatan transfer yang diterima oleh daerah dengan total pendapatan daerah. Ketergantungan finansial pemerintah daerah mencerminkan sejauh mana suatu daerah mengandalkan dana transfer dari pemerintah pusat dibandingkan dengan kemampuan menghasilkan pendapatan asli daerah (PAD). Ketika ketergantungan ini tinggi, daerah cenderung memiliki otonomi fiskal yang rendah dan tidak memiliki fleksibilitas dalam mengelola keuangan secara mandiri. Dalam kondisi ketidakpastian ekonomi atau tekanan fiskal, daerah yang sangat bergantung pada pemerintah pusat lebih rentan mengalami *financial distress*, yaitu kondisi ketika pemerintah daerah kesulitan memenuhi kewajiban fiskalnya secara berkelanjutan. Keterbatasan dalam mengakses sumber pendapatan sendiri membuat daerah tidak mampu merespons dengan cepat terhadap penurunan pendapatan atau kebutuhan belanja mendesak, sehingga meningkatkan risiko terjadinya krisis keuangan. Oleh karena itu, ketergantungan finansial diduga berpengaruh signifikan terhadap tingkat *financial distress* yang dialami oleh pemerintah daerah.

H1: Ketergantungan finansial berpengaruh terhadap *financial distress*.

d. Kemandirian Daerah

Kemandirian keuangan daerah menunjukkan daerah mampu membiayai sendiri segala kegiatan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat yang taat membayar pajak dan retribusi sehingga PAD menjadi prioritas pendapatan daerah. Kemandirian keuangan daerah dapat diukur dari besar kecilnya perbandingan antara pendapatan asli daerah dengan pendapatan daerah yang berasal dari pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan pinjaman daerah (Haptari et al., 2022; Kusumawati, 2024). Kemandirian daerah menunjukkan sejauh mana pemerintah daerah mampu membiayai kebutuhan operasional dan pembangunan dengan mengandalkan pendapatan asli daerah (PAD) tanpa ketergantungan yang tinggi terhadap dana transfer dari pemerintah pusat. Daerah yang memiliki tingkat kemandirian fiskal yang tinggi cenderung lebih stabil secara keuangan karena memiliki kontrol lebih besar atas sumber pendapatannya. Sebaliknya, daerah yang kurang mandiri menghadapi risiko lebih tinggi terhadap financial distress karena ketergantungannya terhadap pendanaan eksternal membuatnya rentan terhadap perubahan kebijakan pusat atau fluktuasi dana transfer. Dalam konteks ini, semakin tinggi tingkat kemandirian daerah, semakin kecil kemungkinan daerah tersebut mengalami tekanan keuangan yang berujung pada financial distress. Dengan demikian, kemandirian fiskal pemerintah daerah diduga berpengaruh negatif terhadap tingkat financial distress.

H2: Kemandirian daerah berpengaruh terhadap *financial distress*

e. Solvabilitas Layanan

Solvabilitas layanan menunjukkan kemampuan Pemerintah daerah menyediakan dan mempertahankan kualitas pelayanan publik yang dibutuhkan dan diinginkan Masyarakat (Hanson et al., 2022). Pengertian lain tentang solvabilitas layanan adalah suatu kemampuan untuk memberikan layanan kepada Masyarakat (Mamun & Chowdhury, 2022). Berdasarkan definisi diatas dapat disimpulkan bahwa penilaian solvabilitas fiskal merupakan bagian penting dari sistem evaluasi kesehatan keuangan pemerintah daerah, termasuk dalam menilai kapasitas layanan publik (Kooij & Groot, 2021). Solvabilitas layanan mencerminkan kemampuan pemerintah daerah dalam memenuhi kewajiban pembiayaan layanan publik melalui pendapatan yang dimilikinya. Indikator ini menggambarkan efisiensi dan kesehatan fiskal pemerintah daerah dalam menjalankan fungsinya sebagai penyedia layanan publik. Daerah yang memiliki tingkat solvabilitas layanan yang baik menunjukkan bahwa pendapatan daerahnya cukup untuk menutup beban belanja yang dibutuhkan untuk pelayanan masyarakat, sehingga risiko mengalami tekanan keuangan menjadi lebih rendah. Sebaliknya, rendahnya solvabilitas layanan dapat mengindikasikan bahwa pendapatan daerah tidak memadai untuk membiayai kebutuhan dasar, yang pada akhirnya dapat mendorong daerah masuk dalam kondisi financial distress. Oleh karena itu, solvabilitas layanan diduga berpengaruh signifikan terhadap tingkat financial distress yang dialami oleh pemerintah daerah.

H3: Solvabilitas layanan berpengaruh terhadap *financial distress*

f. Kemiskinan

Kemiskinan adalah kondisi seseorang atau kelompok dimana tidak mampu mencukupi kebutuhan hidup dasar secara ekonomi sesuai dengan standar yang ditetapkan (Fragoso, 2024). Dalam arti sempit kemiskinan dipahami sebagai keadaan kekurangan uang dan barang untuk menjamin kelangsungan hidup. Sedangkan dalam arti luas kemiskinan adalah suatu fenomena *multiface* atau multidimensional (Brady, 2023; M. Marques, 2023; Mansi et al., 2020). Tingkat kemiskinan merupakan indikator penting yang mencerminkan beban sosial dan ekonomi yang harus ditanggung oleh pemerintah daerah. Daerah dengan tingkat kemiskinan yang tinggi cenderung memiliki tekanan fiskal yang lebih besar karena harus menyediakan lebih banyak program bantuan sosial, subsidi, dan layanan dasar untuk masyarakat berpenghasilan rendah. Kondisi ini meningkatkan beban belanja daerah, sementara kemampuan untuk meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) biasanya terbatas karena daya beli masyarakat yang rendah. Ketidakseimbangan antara kebutuhan belanja sosial dan kemampuan pendanaan inilah yang dapat mendorong terjadinya financial distress. Dengan demikian, semakin tinggi tingkat kemiskinan di suatu daerah, semakin besar pula potensi daerah tersebut mengalami tekanan keuangan. Oleh karena itu, kemiskinan diduga berpengaruh positif terhadap financial distress pemerintah daerah.

H4: Kemiskinan berpengaruh terhadap *financial distress*

g. Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan asli daerah (PAD) merupakan cerminan kapasitas fiskal suatu pemerintah daerah dalam membiayai kebutuhan belanjanya secara mandiri tanpa terlalu bergantung pada transfer dari pemerintah pusat (Islami et al., 2025). Tingginya PAD menunjukkan bahwa daerah memiliki potensi ekonomi yang kuat dan sistem pemungutan pajak atau retribusi yang efektif. Dengan PAD yang memadai, pemerintah daerah memiliki fleksibilitas fiskal yang lebih besar untuk mengelola belanja dan menghadapi tekanan ekonomi, sehingga mampu menjaga kestabilan keuangan secara berkelanjutan. Sebaliknya, daerah dengan PAD yang rendah lebih rentan terhadap financial distress karena tidak memiliki cukup ruang fiskal untuk menutupi kebutuhan belanja wajib, terutama di masa krisis atau saat terjadi penurunan transfer pusat. Oleh karena itu, PAD diduga berpengaruh negatif terhadap financial distress, di mana semakin tinggi PAD suatu daerah, semakin kecil kemungkinan daerah tersebut mengalami tekanan keuangan.

H5: Pendapatan asli daerah berpengaruh terhadap *financial distress*

h. Opini Audit

Opini audit merupakan pernyataan pemeriksa mengenai kewajaran laporan keuangan yang disajikan, sehingga sumber informasi yang terkandung di dalamnya dapat dipercaya sebagai dasar pengambilan Keputusan (Diab & Eissa, 2023). Terdapat empat kriteria pemberian opini audit oleh pemeriksa berdasarkan pada Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara Pasal 16 Ayat 1 yakni kesamaan

dengan standar akuntansi pemerintahan, pengungkapan yang memadai (*adequate disclosures*), kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dan efektivitas sistem pengendalian intern. Opini audit dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mencerminkan tingkat kepatuhan dan kualitas pengelolaan keuangan pemerintah daerah berdasarkan standar akuntansi dan prinsip tata kelola yang baik. Opini audit yang lebih baik, seperti Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), menunjukkan bahwa laporan keuangan disajikan secara wajar dan pengelolaan keuangan berjalan dengan tertib, efisien, dan transparan. Dalam konteks ini, opini audit berperan sebagai variabel moderasi yang dapat memperkuat atau memperlemah pengaruh faktor-faktor fiskal seperti ketergantungan finansial, kemandirian daerah, solvabilitas layanan, kemiskinan, dan PAD terhadap financial distress. Misalnya, daerah dengan ketergantungan tinggi terhadap pusat namun memperoleh opini audit yang baik mungkin memiliki sistem pengelolaan keuangan yang mampu meminimalkan risiko distress. Sebaliknya, meskipun suatu daerah memiliki PAD tinggi, namun jika opini audit menunjukkan banyak temuan atau pengecualian, maka risiko financial distress tetap tinggi. Oleh karena itu, opini audit diduga memoderasi hubungan antara karakteristik keuangan daerah dan tingkat financial distress, baik dalam memperkuat maupun memperlemah arah hubungan tersebut.

H6: Opini audit memoderasi hubungan antara ketergantungan finansial, kemandirian daerah, solvabilitas layanan, kemiskinan, dan pendapatan asli daerah terhadap *financial distress*

Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif untuk menjawab pertanyaan penelitian. Populasi dalam penelitian ini adalah Kabupaten/ Kota se-Jawa tahun 2020-2022. Penelitian ini menggunakan Kabupaten/ Kota se-Jawa tengah disebabkan karena pertumbuhan ekonomi Indonesia masih sentris di pulau Jawa dengan kontribusi PDB triwulan II 2024 sebesar 57,04%. Sampel dalam penelitian ini berjumlah 339 Kabupaten/ Kota se-Jawa (113 Kabupaten/ Kota x 3 tahun). Metode pengambilan sampel menggunakan *purposive sampling* (Campbell et al., 2020), dengan kriteria: (1) Pemerintah daerah meliputi Kabupaten/ Kota se-Jawa; (2) Pemerintah Daerah meliputi Kabupaten/ Kota se-Jawa yang mempublikasikan Laporan Keuangan; (3) Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota se-Jawa pada periode penelitian 2020-2022; (4) Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota se-Jawa yang telah diaudit; serta (5) Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota se-Jawa yang menyajikan data lengkap. Selanjutnya, metode pengumpulan data yang digunakan yakni metode dokumentasi. Metode dokumentasi dilakukan dengan mengumpulkan data yang berasal dari dokumen-dokumen yang sudah ada, yang mana data dalam penelitian ini berasal dari *website* BPK.

**Tabel 1.** Definisi operasional variabel dan pengukurannya

| No. | Variabel Penelitian       | Jenis Variabel | Kode    | Definisi Variabel                                                                                                                                     | Measurement                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-----|---------------------------|----------------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.  | <i>Financial Distress</i> | Dependen       | FD<br>T | <i>Financial Distress</i> adalah ketidakmampuan pemerintah daerah untuk dapat memenuhi kebutuhan daerahnya yang diakibatkan adanya penurunan ekonomi. | <p>1. <i>Budget Solvency</i><br/> <math display="block">BS = \frac{\text{Total Regional Revenue}}{\text{Total Regional Expenditure}}</math></p> <p>2. <i>Financial Performance of the Budget</i><br/> <math display="block">FPB = \frac{\text{Total Regional Revenue} + \text{Total Expenditure}}{\text{Total Regional Revenue}}</math></p> <p>3. <i>Financial Performance of the Fund Equity</i><br/> <math display="block">FPF = \frac{\text{Total Revenue} - \text{Total Expenditure}}{\text{Total Fund Equity}}</math></p> <p>4. <i>Regional Financial Efficiency</i><br/> <math display="block">RFE = \frac{\text{Expenditure}}{\text{Total Revenue}}</math></p> |
| 2.  | Ketergantungan Finansial  | Independen     | KG<br>F | Ketergantungan finansial adalah Besarnya jumlah Penerimaan dana alokasi dari pemerintah pusat terhadap penerimaan daerah.                             | $KGF = \frac{\text{Pendapatan Transfer}}{\text{Total Pendapatan}}$                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |

| No. | Variabel Penelitian    | Jenis Variabel | Kode | Definisi Variabel                                                                                                                                          | Measurement                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-----|------------------------|----------------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3.  | Kemandirian Daerah     | Independen     | KMD  | Kemandirian daerah adalah kondisi ketika pembiayaan penyelenggaraan pemerintah daerah yang dilakukan secara mandiri yang bersumber dari PAD.               | $KMD = \frac{PAD}{Pendapatan Transfer}$                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 4.  | Solvabilitas layanan   | Independen     | SOL  | Solvabilitas layanan diartikan sebagai kemampuan daerah dalam menghasilkan pendapatan untuk menutupi operasionalnya selama satu periode anggaran keuangan. | $\text{Rasio A} = \frac{(Total\ Pendapatan - Pendapatan\ DAK)}{(Total\ Pengeluaran - Belanja\ Modal)}$ $\text{Rasio B} = \frac{(Total\ Pendapatan - Pendapatan\ DAK)}{Belanja\ Operasional}$ $\text{Rasio C} = \frac{(Total\ Pendapatan. - Pendapatan\ DAK)}{Belanja\ Karyawan}$ $\text{Rasio D} = \frac{Total\ Pendapatan}{Total\ Pengeluaran}$                            |
| 5.  | Pendapatan Asli Daerah | Independen     | PAD  | PAD adalah pendapatan yang diperoleh pemerintah daerah dari berbagai sumber didalam wilayahnya sendiri.                                                    | $PAD = Pajak\ Daerah + Retribusi\ Daerah + Hasil\ Pengelolaan\ Kekayaan\ Daerah\ yang\ Dipisahkan + Lain - Lain\ PAD\ yang\ Sah$                                                                                                                                                                                                                                            |
| 6.  | Kemiskinan             | Independen     | KEM  | Kemiskinan adalah keadaan saat ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan, Pakaian, tempat berlindung, pendidikan, dan kesehatan.       | $P_o = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^q \left[ \frac{z - y_1}{z} \right]_0$                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 7.  | Opini Audit            | Moderasi       | OPA  | Opini audit adalah pendapat yang diberikan oleh auditor BPK atas laporan keuangan yang disajikan oleh suatu pemerintah daerah.                             | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pendapat <i>Unqualified Opinion</i> diberi skor 5</li> <li>2. Pendapat <i>Unqualified Opinion with Explanatory Paragraph</i> diberi skor 4</li> <li>3. Pendapat <i>Qualified Opinion</i> diberi skor 3</li> <li>4. Pendapat <i>Adverse Opinion</i> diberi skor 2</li> <li>5. Pendapat <i>Disclaimer</i> diberi skor 1.</li> </ol> |

Penelitian ini menggunakan *financial distress* (FDT) sebagai variabel utama untuk mengukur tingkat tekanan keuangan yang dialami oleh pemerintah daerah. Variabel ini dibentuk dengan menggunakan pendekatan rata-rata tertimbang dari beberapa indikator keuangan daerah, sebagaimana pendekatan yang digunakan oleh United Nations Development Program (UNDP) dalam pembentukan skor Human Development Index (HDI). Rumus pembentukan variabel FD dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

$$FDT = \frac{1}{4}(BS + FPB + FPF + RFE) \quad (1)$$

Penelitian ini mengkaji empat indikator utama dalam mengukur kinerja dan efisiensi keuangan daerah. Pertama, Budget Solvency (BS), yang mencerminkan kemampuan pemerintah daerah dalam memenuhi kewajiban jangka pendeknya. Kedua, Financial Performance of the Budget (FPB), yaitu indikator yang mengukur efektivitas pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah. Ketiga, Financial Performance of the Fund Equity (FPF), yang menunjukkan sejauh mana dana ekuitas dikelola secara optimal untuk mendukung pembiayaan daerah. Terakhir, Regional Financial Efficiency (RFE) merepresentasikan efisiensi pemerintah daerah dalam mengalokasikan dan menggunakan sumber daya keuangan secara maksimal. Rumus ini memberikan gambaran menyeluruh mengenai kondisi keuangan pemerintah daerah dengan menggabungkan aspek efisiensi, solvabilitas, dan performa anggaran. Dalam hal ini FDT dihitung dengan membagi akumulasi dari indeks *budget solvency*, *financial performance of the budget*, *financial performance of the fund equity*, dan *regional financial efficiency*.

Skor FDT yang lebih tinggi menunjukkan tekanan keuangan yang lebih rendah, sedangkan skor yang lebih rendah mencerminkan kondisi keuangan daerah yang semakin tertekan. Oleh karena itu, model regresi dalam penelitian ini dirumuskan:

$$FDT = \alpha + \beta_1 KGF + \beta_2 KMD + \beta_3 SOL + \beta_4 KEM + \beta_5 PAD + \varepsilon \quad (2)$$

$$FDT = \alpha + \beta_1 KGF + \beta_2 KMD + \beta_3 SOL + \beta_4 KEM + \beta_5 PAD + \beta_6 OPA + \beta_7 KGF * OPA + \beta_8 KMD * OPA + \beta_9 SOL * OPA + \beta_{10} KEM * OPA + \beta_{11} PAD * OPA + \varepsilon \quad (3)$$

### 3. HASIL DAN PEMBAHASAN

#### 3.1 Hasil

Berikut merupakan hasil pengujian regresi linier berganda untuk persamaan model 1:

**Tabel 2.** Hasil Uji Regresi Linier Berganda Persamaan 1

| Variabel   | B         | Std. Error | Beta   | t       | Sig.   |
|------------|-----------|------------|--------|---------|--------|
| (Constant) | 0,998     | 0,002      |        | 476,973 | <0,001 |
| KGF        | 0,002     | 0,001      | 0,080  | 1,431   | 0,153  |
| KMD        | -0,021    | 0,008      | -0,293 | -2,449  | 0,015  |
| SOL        | 9,087E-6  | 0,000      | 0,002  | 0,045   | 0,964  |
| KEM        | -1,686E-5 | 0,000      | -0,180 | -2,366  | 0,019  |
| PAD        | 4,267E-15 | 0,000      | 0,421  | 3,319   | 0,001  |

Dependent Variable: FDT

Selanjutnya, Tabel 2 ini adalah hasil pengujian regresi linier berganda untuk persamaan model 2:

**Tabel 3.** Hasil Uji Regresi Linier Berganda Persamaan 2

| Variabel   | B         | Std. Error | Beta   | t      | Sig.   |
|------------|-----------|------------|--------|--------|--------|
| (Constant) | 0,985     | 0,028      |        | 34,710 | <0,001 |
| KGF        | 0,002     | 0,001      | 0,077  | 1,370  | 0,171  |
| SOL        | -0,003    | 0,007      | -0,871 | -0,486 | 0,627  |
| KEM        | 5,888E-5  | 0,000      | 0,627  | 0,462  | 0,644  |
| PAD        | 3,547E-15 | 0,000      | 0,350  | 0,300  | 0,765  |
| OPA        | 0,003     | 0,006      | 0,063  | 0,478  | 0,633  |
| KMDxOPA    | -0,004    | 0,002      | -0,286 | -2,397 | 0,017  |
| SOLxOPA    | 0,001     | 0,001      | 0,872  | 0,487  | 0,627  |
| KEMxOPA    | -1,559E-5 | 0,000      | -0,796 | -0,605 | 0,545  |
| PADxOPA    | 9,308E-17 | 0,000      | 0,044  | 0,038  | 0,969  |

Dependent Variable: FDT

Dibawah ini hasil *excluded variables* saat pengujian regresi linier berganda:

**Tabel 4.** Excluded Variables

| Variabel | Beta   | t      | Sig.  |
|----------|--------|--------|-------|
| KMD      | 15,063 | 0,705  | 0,481 |
| KGFxOPA  | -6,492 | -0,470 | 0,638 |

Pada Tabel 2 persamaan 1 merupakan pengujian yang dilakukan untuk menganalisis hubungan atau interaksi antara masing-masing variabel independen dengan variabel dependennya, yang didapatkan beberapa hasil analisis regresi yakni asil regresi diketahui bahwa besarnya nilai t hitung variabel KGF memiliki signifikansi  $0,153 > 0,05$  yang artinya

ketergantungan finansial tidak berpengaruh terhadap financial distress. Kemudian, variabel KMD mempunyai nilai signifikansi  $0,015 < 0,05$  dapat diinterpretasikan bahwa kemandirian daerah memiliki pengaruh pada finansial distress. Selanjutnya untuk variabel SOL menunjukkan nilai signifikansi  $0,964 > 0,05$ , yang mana solvabilitas layanan dinilai memiliki kontribusi terhadap kejadian financial distress. Berikutnya, uji regresi mendapatkan nilai  $0,019 < 0,05$  untuk variabel KEM, yang artinya variabel kemiskinan berpengaruh terhadap financial distress. Terakhir, variabel PAD memperlihatkan nilai uji regresi  $0,001 < 0,05$  yang menyatakan bahwa pendapatan asli daerah mampu memberikan kontribusi signifikan terhadap financial distress.

Pada Tabel 3 persamaan 2 adalah pengujian yang dilakukan untuk memahami hubungan variabel pemoderator yakni opini audit dengan variabel independen dan variabel dependen. Pengujian tersebut menunjukkan bahwa variabel opini audit dapat memoderasi hubungan antara kemandirian daerah dan financial distress yang dapat dilihat dari tingkat signifikansi variabel  $KMD \times OPA$  sebesar  $0,017 < 0,05$ . Selanjutnya, didapat bahwa opini audit tidak dapat memoderasi hubungan antara solvabilitas layanan dengan financial distress, hal ini dapat dilihat dari nilai uji signifikansi pada variabel  $SOL \times OPA$  yang telah dilakukan menunjukkan nilai  $0,627 > 0,05$ . Berikutnya, variabel  $KEM \times OPA$  memiliki nilai signifikansi sebesar  $0,545 > 0,05$ , yang artinya bahwa opini audit tidak dapat menjadi variabel pemoderasi antara kemiskinan dan financial distress. Terakhir, untuk variabel  $PAD \times OPA$  memiliki nilai uji regresi dengan tingkat signifikansi  $0,969 > 0,05$  yang dapat diartikan bahwa opini audit juga tidak dapat memoderasi hubungan antara variabel pendapatan asli daerah dengan financial distress.

Hasil analisis regresi dengan metode stepwise menunjukkan bahwa dua variabel, yaitu Kemandirian Daerah (KMD) dan interaksi antara Ketergantungan Finansial dan Opini Audit ( $KGF \times OPA$ ) tidak dimasukkan ke dalam model akhir. Hal ini karena keduanya memiliki nilai signifikansi lebih besar dari 0,05, masing-masing 0,481 dan 0,638, yang berarti tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen. Nilai t-statistik yang rendah (0,705 untuk KMD dan -0,470 untuk  $KGF \times OPA$ ) juga menunjukkan bahwa kontribusinya terhadap model sangat lemah. Dengan demikian, variabel-variabel ini dieliminasi secara otomatis oleh sistem karena tidak menambah daya prediksi model. Ini sejalan dengan prinsip parsimonious model, yaitu mempertahankan hanya variabel yang benar-benar relevan agar model lebih efisien dan akurat.

### 3.2 Pembahasan

#### a. Ketergantungan finansial tidak berpengaruh terhadap financial distress

Hasil penelitian menunjukkan bahwa ketergantungan finansial pemerintah daerah tidak berpengaruh signifikan terhadap *financial distress*. Penelitian ini sejalan dengan (Rahmi & Sari, 2023) yang menyatakan bahwa desentralisasi tidak berpengaruh terhadap *financial distress*. Hal ini mengindikasikan bahwa meskipun suatu daerah memiliki tingkat ketergantungan yang tinggi terhadap dana transfer dari pemerintah pusat, hal tersebut tidak secara langsung menyebabkan daerah mengalami tekanan keuangan (Mamun & Chowdhury, 2022). Salah satu kemungkinan penyebabnya adalah adanya kepastian dan konsistensi alokasi dana transfer yang diterima, seperti Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK), yang membuat daerah tetap mampu memenuhi kebutuhan belanja wajibnya (Ardiansyah et al., 2024). Selain itu, pemerintah pusat juga memiliki mekanisme perlindungan fiskal melalui kebijakan dana insentif daerah, dana cadangan, atau program pemulihan ekonomi daerah, yang dapat mengurangi dampak ketergantungan tersebut terhadap kondisi keuangan daerah. Dengan demikian, tingkat ketergantungan finansial tidak selalu menjadi indikator utama dalam menentukan apakah suatu daerah mengalami financial distress atau tidak, karena masih banyak faktor lain yang turut memengaruhi stabilitas keuangan pemerintah daerah.

#### b. Kemandirian daerah berpengaruh terhadap *financial distress*

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kemandirian daerah berpengaruh signifikan terhadap financial distress pemerintah daerah. Penelitian ini memperkuat (Nazar Ali & Indra Arza, 2024) yang melakukan penelitian serupa. Temuan ini memperkuat pemahaman bahwa kemampuan fiskal yang dimiliki daerah untuk membiayai belanja secara mandiri memainkan peran penting dalam menjaga stabilitas keuangan. Daerah yang memiliki tingkat kemandirian tinggi, tercermin dari proporsi PAD yang besar terhadap total pendapatan, cenderung lebih mampu mengelola risiko fiskal dan menjalankan fungsi pemerintahan secara berkelanjutan (Alshaib et al., 2023). Hal ini disebabkan oleh fleksibilitas fiskal yang lebih besar, yang memungkinkan pemerintah daerah untuk menyesuaikan belanja dengan kondisi ekonomi dan kebutuhan masyarakat tanpa terlalu bergantung pada dana dari pemerintah pusat. Sebaliknya, daerah dengan kemandirian rendah lebih rentan terhadap financial distress karena bergantung pada dana transfer yang tidak selalu stabil atau cukup. Dengan demikian, hasil ini mengindikasikan bahwa peningkatan kemandirian fiskal merupakan salah satu strategi penting untuk mengurangi potensi krisis keuangan di tingkat pemerintah daerah.

#### c. Solvabilitas layanan tidak berpengaruh terhadap *financial distress*

Sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Eliza et al., 2024) bahwa hasil penelitian menunjukkan solvabilitas layanan pada pemerintah daerah tidak berpengaruh signifikan terhadap financial distress. Artinya, tingkat solvabilitas yang umumnya mengukur kemampuan pemerintah daerah untuk memenuhi kewajiban jangka panjangnya tidak secara langsung mempengaruhi kondisi financial distress yang dialami oleh pemerintah daerah tersebut. Fenomena ini bisa dijelaskan dari karakteristik khusus pengelolaan keuangan pemerintah daerah yang berbeda dengan entitas bisnis pada umumnya. Pemerintah daerah tidak berorientasi pada laba dan memiliki sumber pendapatan yang relatif stabil dan terikat regulasi, seperti dana perimbangan dan pajak daerah, sehingga risiko financial distress tidak hanya bergantung pada solvabilitas saja.

Selain itu, *financial distress* pada pemerintah daerah lebih dipengaruhi oleh faktor lain seperti efisiensi pengelolaan anggaran, pengendalian belanja, pengelolaan kas, pengelolaan investasi, pengelolaan hutang, serta kebijakan fiskal yang diterapkan (Abeysekera, 2024). Faktor-faktor tersebut cenderung lebih determinan dalam menentukan kemampuan pemerintah daerah dalam menjaga keseimbangan keuangan dan menghindari kondisi defisit yang dapat memicu *financial distress*. Penelitian ini juga mengindikasikan bahwa solvabilitas pemerintah daerah mungkin belum sepenuhnya mencerminkan risiko fiskal yang sesungguhnya karena adanya intervensi pusat, mekanisme dana transfer, dan aturan anggaran yang ketat. Oleh karena itu, meskipun solvabilitas tercatat baik, pemerintah daerah tetap dapat mengalami tekanan keuangan apabila aspek pengelolaan keuangan lainnya tidak optimal. Temuan ini menggarisbawahi pentingnya melakukan evaluasi yang komprehensif terhadap kesehatan keuangan pemerintah daerah dengan memperhatikan indikator-indikator lain seperti likuiditas, efektivitas belanja, dan kualitas pengelolaan pendapatan. Solvabilitas saja tidak cukup untuk menggambarkan kondisi *financial distress* di sektor layanan pemerintah daerah.

d. Kemiskinan berpengaruh terhadap *financial distress*

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kemiskinan memiliki pengaruh signifikan terhadap *financial distress*. Penelitian ini mendukung (Sari & Kristanti, 2024) yang menemukan bahwa masyarakat dengan pendapatan yang rendah mengalami krisis finansial yang serius. Hal ini mengindikasikan bahwa tingkat kemiskinan yang tinggi dapat menjadi faktor penyebab meningkatnya risiko *financial distress*, baik pada individu, kelompok masyarakat, maupun pada level pemerintah daerah (Brady, 2023; Cooper, 2021; M. Marques, 2023). Kemiskinan menyebabkan keterbatasan akses terhadap sumber daya finansial, pendapatan yang tidak stabil, dan rendahnya kemampuan untuk mengelola keuangan secara optimal (Cooper, 2021). Kondisi ini memicu ketidakseimbangan antara pendapatan dan pengeluaran sehingga berpotensi menimbulkan tekanan finansial yang berujung pada *financial distress*. Di tingkat pemerintah daerah, tingginya angka kemiskinan juga berdampak pada berkurangnya basis pajak dan pendapatan asli daerah, sehingga kemampuan pemerintah untuk membiayai kebutuhan layanan publik menjadi terganggu (Wang et al., 2021). Akibatnya, pemerintah daerah menghadapi kesulitan likuiditas dan risiko defisit anggaran yang bisa mengarah pada *financial distress*.

Lebih jauh, kemiskinan juga berdampak pada perputaran ekonomi lokal. Jika konsumsi menurun, pendapatan daerah pun ikut menurun sehingga berpengaruh negatif terhadap stabilitas keuangan daerah (Mansi et al., 2020). Temuan ini menegaskan pentingnya upaya pengentasan kemiskinan sebagai bagian dari strategi untuk menjaga kesehatan keuangan dan mencegah *financial distress*, baik di tingkat individu maupun institusi pemerintah. Kebijakan yang fokus pada peningkatan kesejahteraan masyarakat dan pemberdayaan ekonomi dapat menjadi solusi efektif dalam mengurangi risiko *financial distress* yang diakibatkan oleh kemiskinan.

e. Pendapatan asli daerah berpengaruh terhadap *financial distress*

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pendapatan asli daerah (PAD) berpengaruh signifikan terhadap *financial distress* pada pemerintah daerah, sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Rupilu et al., 2023). Hal ini mengindikasikan bahwa peningkatan PAD dapat membantu mengurangi risiko terjadinya *financial distress*, sedangkan penurunan PAD berpotensi memperbesar kemungkinan pemerintah daerah mengalami tekanan keuangan (Arsyad & Nalien, 2024). PAD merupakan sumber pendapatan utama yang berasal dari wilayah sendiri, seperti pajak daerah, retribusi, dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan. Ketersediaan PAD yang memadai menunjukkan kemampuan pemerintah daerah untuk membiayai operasional dan kebutuhan pembangunan tanpa terlalu bergantung pada dana transfer dari pemerintah pusat atau sumber lain yang tidak stabil (Arsyad & Nalien, 2024).

Ketergantungan yang tinggi pada PAD memungkinkan pemerintah daerah untuk memiliki fleksibilitas lebih dalam mengelola keuangannya, menjaga likuiditas, serta menyesuaikan anggaran dengan kebutuhan nyata. Sebaliknya, jika PAD rendah atau tidak optimal, pemerintah daerah akan kesulitan memenuhi kewajiban keuangan dan pembiayaan layanan publik sehingga meningkatkan risiko *financial distress* (D. N. Sari & Murtanto, 2024). Temuan ini menegaskan pentingnya optimalisasi pengelolaan PAD sebagai salah satu strategi utama dalam menjaga kesehatan keuangan pemerintah daerah. Pemerintah daerah perlu meningkatkan potensi PAD melalui inovasi kebijakan fiskal, peningkatan kepatuhan pajak, dan efisiensi administrasi agar mampu menciptakan sumber pendapatan yang stabil dan berkelanjutan. Dengan demikian, pengelolaan PAD yang baik akan berkontribusi positif dalam mengurangi risiko *financial distress* dan mendukung pembangunan daerah secara berkelanjutan.

f. Opini audit memoderasi hubungan antara ketergantungan finansial, kemandirian daerah, solvabilitas layanan, kemiskinan, dan pendapatan asli daerah terhadap *financial distress*

Opini audit merupakan pendapat resmi auditor mengenai kewajaran laporan keuangan pemerintah daerah. Ketika opini audit yang diberikan adalah wajar tanpa pengecualian, laporan keuangan dianggap transparan dan dapat dipercaya. Dalam kondisi ini, kemandirian daerah yang mengindikasikan kemampuan daerah mengelola keuangannya secara mandiri akan lebih efektif dalam mencegah *financial distress* (Kraus et al., 2021). Opini audit yang baik memperkuat pengaruh positif kemandirian daerah dengan meningkatkan kredibilitas dan validitas data keuangan sebagai dasar pengambilan keputusan. Namun, opini audit tidak memoderasi hubungan antara solvabilitas layanan dan *financial distress*. Hal ini dapat terjadi karena solvabilitas layanan yang menggambarkan efisiensi fiskal dan kemampuan pembiayaan layanan publik tidak selalu tercermin secara langsung dalam opini audit (Kooij & Groot, 2021; Mishi et al., 2022), yang lebih menilai kepatuhan dan penyajian teknis laporan keuangan. Oleh karena itu, jenis opini audit tidak mengubah kekuatan hubungan antara solvabilitas layanan dan risiko *financial distress*.

Selain itu, opini audit juga tidak memoderasi hubungan langsung antara kemandirian daerah dan financial distress secara umum maupun hubungan variabel lain dengan financial distress. Ini menunjukkan bahwa pengaruh kemandirian daerah dan faktor-faktor lain terhadap *financial distress* cukup kuat dan independen tanpa tergantung pada opini audit sebagai variabel penguat. Secara keseluruhan, opini audit berperan penting dalam memperkuat pengaruh kemandirian daerah terhadap *financial distress*, tetapi tidak berperan sebagai moderator pada hubungan solvabilitas layanan dengan financial distress maupun hubungan langsung lainnya.

Meskipun demikian, hasil analisis regresi dengan metode stepwise menunjukkan bahwa variabel **KMD** dan **KGFxOPA** tidak dimasukkan ke dalam model akhir, sebagaimana ditunjukkan pada Tabel *Excluded Variables*. Nilai signifikansi untuk variabel KMD sebesar **0,481** dan untuk KGFxOPA sebesar **0,638**, keduanya melebihi ambang batas signifikansi yang umum digunakan, yaitu 0,05. Hal ini mengindikasikan bahwa kedua variabel tersebut tidak memiliki kontribusi yang signifikan secara statistik terhadap model regresi yang dibangun. Lebih lanjut, nilai **t-hitung** yang relatif rendah (0,705 untuk KMD dan -0,470 untuk KGFxOPA) juga memperkuat temuan bahwa pengaruh kedua variabel terhadap variabel dependen tidak signifikan. Meskipun nilai koefisien Beta menunjukkan arah hubungan (positif untuk KMD dan negatif untuk KGFxOPA), namun karena nilai-nilai tersebut tidak didukung oleh signifikansi statistik yang memadai, maka keduanya **dikeluarkan dari model prediksi akhir**. Pengeluaran variabel-variabel ini sejalan dengan prinsip efisiensi model dalam regresi stepwise, yaitu hanya mempertahankan variabel-variabel independen yang mampu memberikan kontribusi signifikan terhadap variasi variabel dependen (Susiwo et al., 2014). Dengan demikian, model akhir yang dihasilkan lebih parsimonious dan memiliki daya prediksi yang lebih baik.

#### 4. KESIMPULAN

Hasil penelitian menunjukkan bahwa ketergantungan finansial pemerintah daerah terhadap dana transfer pusat tidak berpengaruh signifikan terhadap financial distress, kemungkinan karena adanya kepastian alokasi dana dan mekanisme perlindungan fiskal dari pemerintah pusat. Sebaliknya, kemandirian daerah dan pendapatan asli daerah (PAD) berpengaruh signifikan dalam mengurangi risiko financial distress, karena keduanya mencerminkan kemampuan fiskal daerah untuk mengelola keuangan secara mandiri dan berkelanjutan. Kemiskinan juga terbukti berpengaruh signifikan meningkatkan risiko financial distress, mengingat tingginya kemiskinan menurunkan basis pajak dan PAD serta mengganggu likuiditas daerah. Namun, solvabilitas layanan tidak berpengaruh signifikan terhadap financial distress, mengingat karakteristik pengelolaan keuangan pemerintah daerah yang berbeda dengan entitas bisnis dan adanya intervensi pusat. Opini audit yang wajar tanpa pengecualian memperkuat pengaruh kemandirian daerah terhadap financial distress, namun tidak memoderasi hubungan antara solvabilitas layanan, ketergantungan finansial, kemiskinan, PAD, dan *financial distress* secara keseluruhan. Dengan demikian, menjaga kemandirian fiskal, meningkatkan PAD, serta mengentaskan kemiskinan menjadi kunci utama dalam mengelola risiko *financial distress* pada pemerintah daerah. Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan yang perlu diperhatikan. Pertama, ruang lingkup penelitian dibatasi hanya pada pemerintah daerah di Pulau Jawa, sehingga hasilnya belum dapat digeneralisasikan untuk seluruh daerah di Indonesia yang memiliki karakteristik fiskal dan sosial yang lebih beragam. Kedua, penelitian ini menggunakan data sekunder dari laporan keuangan dan opini audit yang tersedia secara publik, sehingga ada kemungkinan adanya keterbatasan dalam merepresentasikan kondisi riil di lapangan. Ketiga, variabel moderasi opini audit hanya diuji dalam bentuk interaksi linier tanpa mempertimbangkan bentuk non-linear atau pendekatan struktural yang lebih kompleks, yang mungkin dapat memberikan gambaran hubungan yang lebih menyeluruh. Lebih jauh, peneliti menyarankan pemerintah daerah untuk meningkatkan kemandirian fiskal dengan mengoptimalkan pengelolaan pendapatan asli daerah melalui inovasi kebijakan pajak dan efisiensi administrasi guna mengurangi ketergantungan pada dana pusat, sekaligus memprioritaskan pengentasan kemiskinan sebagai upaya penting dalam menjaga kesehatan keuangan daerah. Selain itu, penguatan manajemen keuangan dan pengendalian belanja perlu dilakukan untuk menjaga solvabilitas layanan meskipun tidak berdampak langsung pada *financial distress*. Transparansi dan kualitas laporan keuangan harus terus dijaga agar opini audit dapat memperkuat kredibilitas pengelolaan keuangan daerah, mendukung pengelolaan kemandirian fiskal, serta memungkinkan kebijakan fiskal daerah menjadi lebih fleksibel dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat dan kondisi ekonomi lokal guna mencegah potensi *financial distress* secara lebih efektif. Terakhir, penelitian mendatang disarankan untuk memperluas cakupan geografis dengan menyertakan seluruh provinsi di Indonesia agar temuan menjadi lebih representatif secara nasional. Selain itu, penggunaan data primer seperti wawancara atau survei terhadap pejabat daerah dan auditor dapat memperkaya pemahaman kontekstual mengenai pengambilan keputusan fiskal dan pengaruh opini audit. Peneliti selanjutnya juga dapat mempertimbangkan metode analisis alternatif, seperti Structural Equation Modeling (SEM) atau panel data regression, untuk menangkap hubungan kompleks antara variabel karakteristik fiskal, opini audit, dan financial distress secara lebih mendalam. Terakhir, disarankan untuk mengeksplorasi peran faktor institusional seperti kualitas tata kelola, transparansi anggaran sebagai variabel intervening atau moderating tambahan.

#### UCAPAN TERIMAKASIH

Peneliti mengucapkan puji syukur kehadiran Allah SWT atas segala limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga penulisan karya ilmiah ini dapat diselesaikan dengan baik. Penulis juga menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya

kepada **Lembaga Riset dan Inovasi (LRI) Universitas Muhammadiyah Surakarta** yang telah memberikan dukungan, baik dalam bentuk fasilitas, pendanaan, maupun arahan selama proses penelitian ini berlangsung. Ucapan terima kasih juga penulis sampaikan kepada seluruh pihak yang telah membantu, baik secara langsung maupun tidak langsung, dalam penyusunan karya ilmiah ini. Semoga segala bantuan dan kontribusi yang diberikan menjadi amal jariyah yang bermanfaat.

## REFERENCES

- Abeyskera, I. (2024). The Influence of Fiscal, Monetary, and Public Policies on Sustainable Development in Sri Lanka. *Sustainability (Switzerland)*, 16(2). <https://doi.org/10.3390/su16020580>
- Alshaib, B. M., Al khatib, A. M. G., Nuta, A. C., Hamra, M., Mishra, P., Gautam, R., Hussain, S., & Zamfir, C. G. (2023). Fiscal Sustainability and Its Implications for Economic Growth in Egypt: An Empirical Analysis. *SAGE Open*, 13(4). <https://doi.org/10.1177/21582440231215983>
- Angela Maricilia Surianastutiningtyas Susiswo, Wlingi, N., Surianastutiningtyas, A. M., Program, S., Matematika, S., Matematika, F., Ilmu, D., Alam, P., Kuncu, K., Nasabah, K., & Komponen Utama, R. (2014). *Implementasi regresi komponen utama dan regresi stepwise terhadap faktor-faktor kepuasan nasabah*.
- Ardiansyah, A., Goo, F., & Digidowiseiso, K. (2024). Analysis of Fiscal Gaps and Regional Transfers Between Regions in Indonesia. *Kumba Digidowiseiso*, 3(5), 1.
- Arsyad, A. N. A., & Nalien, E. M. (2024). Regional Financial Capability Analysis Bone District in Return of National Economic Recovery Loans. *Jurnal Bina Praja*, 16(2), 307–320. <https://doi.org/10.21787/jbp.16.2024.307-320>
- Brady, D. (2023). *Poverty, not the poor*.
- Brändle, T., & Elsener, M. (2024). Do fiscal rules matter? A survey of recent evidence. *Swiss Journal of Economics and Statistics*, 160(1), 11. <https://doi.org/10.1186/s41937-024-00128-z>
- Campbell, S., Greenwood, M., Prior, S., Shearer, T., Walkem, K., Young, S., Bywaters, D., & Walker, K. (2020). Purposive sampling: complex or simple? Research case examples. *Journal of Research in Nursing*, 25(8), 652–661. <https://doi.org/10.1177/1744987120927206>
- Cooper, K. (2021). Are Poor Parents Poor Parents? The Relationship between Poverty and Parenting among Mothers in the UK. *Sociology*, 55(2), 349–383. <https://doi.org/10.1177/0038038520939397>
- Cuellar, N. G. (2024). The benefits of being a “peer-reviewer”. *Journal of Transcultural Nursing*, 35(3), 185. <https://doi.org/10.1177/10436596241247667>
- Dawood, M., Feng, Z. R., Ilyas, M., & Abbas, G. (2024). External Debt, Transmission Channels, and Economic Growth: Evidence of Debt Overhang and Crowding-Out Effect. *SAGE Open*, 14(3). <https://doi.org/10.1177/21582440241263626>
- Dewi Haptari, V., Muliarta Ginting, A., David Aritonang, (2022). Strategy For Increasing Regional Original Income Through Strengthening Some Factors In Regional Financial Independence. *Jurnal Ekonomi*, 11(3). <http://ejournal.seaninstitute.or.id/index.php/Ekonomi>
- Diab, A., & Eissa, A. M. (2024). ESG Performance, Auditor Choice, and Audit Opinion: Evidence from an Emerging Market. *Sustainability*, 16(1), 124. <https://doi.org/10.3390/su16010124>
- Eliza, I., Masnila, N., & Dwitayanti, Y. (2024). Analisis pengaruh solvabilitas dan derajat desentralisasi terhadap financial distress provinsi di Indonesia. *Jurnal Media Akuntansi*, 7(1), 117–130. <https://jurnal.univpgri-palembang.ac.id/index.php/mediasi>
- Garschagen, M., & Doshi, D. (2022). Does funds-based adaptation finance reach the most vulnerable countries? *Global Environmental Change*, 73. <https://doi.org/10.1016/j.gloenvcha.2021.102450>
- Hanson, K., Brikci, N., Erlangga, D., Alebachew, A., De Allegri, M., Balabanova, D., Blecher, M., Cashin, C., Esperato, A., Hipgrave, D., Kalisa, I., Kurowski, C., Meng, Q., Morgan, D., Mtei, G., Nolte, E., Onoka, C., Powell-Jackson, T., Roland, M., Sadanandan, R., ... Wurie, H. (2022). The Lancet Global Health Commission on financing primary health care: putting people at the centre. *The Lancet. Global health*, 10(5), e715–e772. [https://doi.org/10.1016/S2214-109X\(22\)00005-5](https://doi.org/10.1016/S2214-109X(22)00005-5)
- Indra, I., Iskak, J., & Khaq, A. (2022). Enhancing the Role of the Audit Board of the Republic of Indonesia in Fraud Detection. *Jurnal Tata Kelola Dan Akuntabilitas Keuangan Negara*, 8(2), 131–143. <https://doi.org/10.28986/jtaken.v8i2.935>
- Islami, R., Ansar, R., & Azizah, T. (2025). The Role of Regional Original Income, Regional Size, and Transfer Funds in Improving Regional Financial Performance. *Indonesian Interdisciplinary Journal of Sharia Economics (IIJSE)*, 8(2), 4745–4766. <https://doi.org/10.31538/ijse.v8i2.6337>
- Kooij, J., & Groot, T. (2021). Towards a comprehensive assessment system of local government fiscal health. *Maandblad Voor Accountancy En Bedrijfseconomie*, 95(7/8), 233–244. <https://doi.org/10.5117/mab.95.67693>
- Kraus, S., Jones, P., Kailer, N., Weinmann, A., Chaparro-Banegas, N., & Roig-Tierno, N. (2021). Digital Transformation: An Overview of the Current State of the Art of Research. *SAGE Open*, 11(3). <https://doi.org/10.1177/21582440211047576>
- Kusumawati, A. F. (2025). Financial Distress vs Financial Health vs Financial Sustainability: Manakah yang Mencerminkan Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia Saat Ini?. *Jurnal Akuntansi Dan Pajak*, 25(2). Retrieved from <https://jurnal.stic-aas.ac.id/index.php/jap/article/view/16201>
- M. Marques, A. (2023). Poverty, population growth and agglomeration effects in all Brazil cities. *Economia*, 24(2), 249–263. <https://doi.org/10.1108/ECON-11-2022-0163>
- Mai, W., Li, C., Chen, Y., & Mai, L. (2024). Exploring the Influence of Digital Infrastructure on Fiscal Self-Sufficiency: Empirical Evidence From 29 Provincial in China. *SAGE Open*, 14(4). <https://doi.org/10.1177/21582440241284108>
- Mamun, T. M., & Chowdhury, S. (2022). Assessing fiscal health of local governments in Bangladesh: evidence from some south-western municipalities. *Public Administration and Policy*, 25(1), 50–63. <https://doi.org/10.1108/PAP-04-2021-0027>
- Mansi, E., Hysa, E., Panait, M., & Voica, M. C. (2020). Poverty-A challenge for economic development? Evidences from Western Balkan countries and the European union. *Sustainability (Switzerland)*, 12(18). <https://doi.org/10.3390/SU12187754>
- Maulana Yusuf Ibrahim, & Khomsiyah, K. (2024). The Influence of Audit Opinions and Audit Findings on the Level of Regional Government Corruption in Indonesia. *International Journal of Business and Quality Research*, 2(03), 171-179. <https://doi.org/10.63922/ijbqr.v2i03.996>

- Mishi, S., Mbaleki, N., & Mushonga, F. B. (2022). Financial mismanagement and efficiency trade-off in local municipalities: Lessons from Eastern Cape, South Africa. *Journal of Local Government Research and Innovation*, 3(0), a68,1-16. <https://doi.org/10.4102/jolgr.v3i0.68>
- Nazar Ali, I., & Indra Arza, F. (2024). Pengaruh Kemandirian Daerah dan Level of Capital Outlay Terhadap Financial Distress: Studi Empiris pada Pemerintahan Daerah Kabupaten dan Kota di Sumatera Barat Periode 2019-2023. *JEA Jurnal Eksplorasi Akuntansi (JEA)*, 7(2). <https://doi.org/10.24036/jea.v7i2.2630>
- Padovani, E., Porcelli, F. & Zanardi, A. (2024). The determinants of the financial distress of Italian municipalities: How much is it due to inadequate resources?. *Int Tax Public Finance* 31(0), 1494–1533. <https://doi.org/10.1007/s10797-024-09856-7>
- Paranata, A. (2022). The miracle of anti-corruption efforts and regional fiscal independence in plugging budget leakage: evidence from western and eastern Indonesia. *Heliyon*, 8(10). <https://doi.org/10.1016/j.heliyon.2022.e11153>
- Pitasse Fragoso, K. (2024). Poverty as capability deprivation: Considering the relational approach, group-based analysis, and socio-structural lens. *European Journal of Social Theory*, 28(2), 247-263. <https://doi.org/10.1177/13684310241270471>
- Rahmi, H. S. L., & Sari, V. F. (2023). Pengaruh Karakteristik Pemerintah Daerah terhadap Prediksi Financial Distress pada Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016-2020. *Jurnal Nuansa Karya Akuntansi*, 1(2), 145–156. <https://doi.org/10.24036/jnka.v1i2.12>
- Rupilu, W., Tanan, E. H. P., & Lakusa, M. (2023). Analisis pengaruh pertumbuhan pendapatan asli daerah dan pertumbuhan belanja modal terhadap fiscal stress. *Public Policy: Jurnal Ilmu Administrasi Negara*, 4(1), 48–62. <https://stia-saidperintah.e-journal.id/ppj>
- Sakina, A. S. S. W., Yaacob, S. E. B., & Salleh, M. F. B. M. (2024). Zurri Waqf Reporting: Accounting Theories and Stewardship in Achieving SDG. *Journal of Lifestyle and SDGs Review*, 4(2), e01962. <https://doi.org/10.47172/2965-730x.sdgsreview.v4.n02.pe01962>
- Sari, D. N., & Murtanto. (2024). Profil Daerah Dan Rasio Keuangan Terhadap Financial Distress Di Pemerintah Provinsi Di Indonesia. *Jurnal Informasi, Perpajakan, Akuntansi, Dan Keuangan Publik*, 19(2), 243–266. <https://doi.org/10.25105/jipak.v19i2.20485>
- Sari, S. D., & Kristanti, F. T. (2024). Analysis of Financial Distress Factors Using Survival Analysis. *JURNAL AKUNTANSI DAN BISNIS : Jurnal Program Studi Akuntansi*, 10(2), 114–122. <https://doi.org/10.31289/jab.v10i2.12144>
- Seldal, M. M. N., & Nyhus, E. K. (2022). Financial Vulnerability, Financial Literacy, and the Use of Digital Payment Technologies. *Journal of Consumer Policy*, 45(2), 281–306. <https://doi.org/10.1007/s10603-022-09512-9>
- Soto, G., Jardon, C. M., & Martinez-Cobas, X. (2024). FDI and income inequality in tax-haven countries: The relevance of tax pressure. *Economic Systems*, 48(1). <https://doi.org/10.1016/j.ecosys.2023.101172>
- Tarighi, H., Hosseiny, Z. N., Abbaszadeh, M. R., Zimon, G., & Haghighat, D. (2022). How Do Financial Distress Risk and Related Party Transactions Affect Financial Reporting Quality? Empirical Evidence from Iran. *Risks*, 10(3). <https://doi.org/10.3390/risks10030046>
- Wang, F., Chai, W., Shi, X., Dong, M., & Yan, B. (2021). Does Regional Financial Resource Contribute to Economic Growth? From the Perspective of Spatial Correlation Network. *SAGE Open*, 11(1). <https://doi.org/10.1177/2158244021999381>
- Wang, Y., & Tziamalis, A. (2023). International tourism and income inequality: The role of economic and financial development. *Tourism Economics*, 29(7), 1836–1864. <https://doi.org/10.1177/13548166231177106>
- Wojtowicz, A., & Hodzic, S. (2023). Financial sustainability of local governments: The role of external factors. *Sustainability*, 15(10), 8082. <https://doi.org/10.3390/su15108082>
- Xiong, M., Li, W., Teo, B. S. X., & Othman, J. (2022). Can China's Digital Inclusive Finance Alleviate Rural Poverty? An Empirical Analysis from the Perspective of Regional Economic Development and an Income Gap. *Sustainability (Switzerland)*, 14(24). <https://doi.org/10.3390/su142416984>
- Xu, X. L., Sun, C., Li, Y., & Zhou, N. (2020). The Effects of Environmental Management and Debt Financing on Sustainable Financial Growth in the Tourism Industry. *SAGE Open*, 10(3). <https://doi.org/10.1177/2158244020948530>
- Zhao, Y., Li, Y., Feng, C., Gong, C., & Tan, H. (2022). Early Warning of Systemic Financial Risk of Local Government Implicit Debt Based on BP Neural Network Model. *Systems*, 10(6). <https://doi.org/10.3390/systems10060207>